

Model E-Bumdes dalam pengembangan pedesaan

E-BUMDes model in rural development

Ony Widilestariningtyas, Adeh Ratna Komala, Apriani Puti Purfini

^{1,3} Prodi Akuntansi FEB UNIKOM

² Prodi Komputerisasi Akuntansi FTIK UNIKOM ^{1,3}

Jl. Diaptiukur No.112-116 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email : ony.widilestariningtyas@email.unikom.ac.id

Abstrak - BUMDes dibentuk dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat bagi masyarakat, hanya saja terdapat beberapa kendala diantaranya belum terdatanya potensi desa yang dapat digunakan sebagai usaha-usaha yang dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat di desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, eksplanatori dan eksperimen dimana untuk analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi BUMDes yang sedang berjalan. Setelah itu dieksplor untuk mengungkapkan beragam temuan yang diperoleh di lapangan diantaranya terkait dengan kendala dan potensi yang bisa dikembangkan. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk membuat model e-BUMDes yang digunakan untuk mendata potensi-potensi desa sehingga bisa terlihat keunggulan unit bisnis yang ada di desa dan potensi tersebut bisa dikembangkan guna memenuhi kebutuhan operasional masyarakat desa. Dengan meningkatnya potensi desa maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah pedesaan.

Kata kunci : Bumdes, pendapatan asli daerah, e-government.

Abstract - BUMDes is formed with the aim of improving the village economy by improving services to the community and optimizing the village asset to benefit the community, there are only a few obstacles such as the unrealized potential of the village that can be used as efforts that can support the community economy in the village. The method used in this research is descriptive analysis, explanatory and experiment where for descriptive analysis used to describe the condition of BUMDes that is running. After that it was explored to reveal various findings obtained in the field, among others related to the constraints and potential that can be developed. The urgency of this research is to create an e-BUMDes model that is used to record the potential of the village so that it can see the advantages of existing business units in the village and the potential can be developed to meet the operational needs of the village community. With the increasing potential of the village it will have an impact on the original income of rural areas.

Keyword : BUMDes, district own source revenue, e-government.

I. PENDAHULUAN

PP No. 60/2014 tentang Dana Desa merupakan payung hukum yang mengatur bahwa desa sudah bisa aktif membangun dan perlu dukungan dana. Dalam memenuhi dukungan tersebut difasilitasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Fungsi lembaga sosial tentunya BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan fungsi komersial berkaitan dengan tujuan dari BUMDes diantaranya:

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa,
- b. Meningkatkan Pendapatan asli Desa,
- c. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Keempat tujuan pendirian BUMDes idealnya harus melekat pada visi dan misi pemerintahan desa. Bagi perangkat desa keempat tujuan tersebut harus menjadi sikap dan dedikasi yang harus dijalankan.

Idealisme para pengurus BUMDes sangat diperlukan terutama dalam menjalankan prinsip pengelolaannya. Prinsip pengelolaan BUMDes mencakup kooperatif, partisipatif, transparansi, accountable, dan sustainable. Prinsip kooperatif dimana dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pelanggan maupun mitra kerja lainnya. Berikutnya perlu adanya keterlibatan aktif dari para warga masyarakat (partisipatif), prinsip keterbukaan informasi (transparansi) dimana informasi terkait perkembangan BUMDes dapat diakses masyarakat luas dan meyakini bahwa informasi merupakan hak publik, selanjutnya dalam pengelolaan desa dapat dipertanggungjawabkan (accountable) dimana segala kegiatan dalam pengelolaan desa harus terdokumentasikan dengan baik, prinsip terakhir dalam pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara berkelanjutan (sustainable).

Permasalahan yang dihadapi BUMDes adalah permasalahan klasik diantaranya permasalahan sumber daya manusia, dukungan permodalan, fasilitas dan pemasaran. Terkait dengan SDM adalah kurangnya potensi keilmuan yang dimiliki oleh masyarakat desa

dalam mengelola potensi desa. Dukungan permodalan berkaitan dengan perlunya dukungan modal dalam menjalankan usaha dari para pelaku bisnis di masyarakat. Fasilitas yang diperlukan dalam mengembangkan potensi desa juga masih sangat kurang dan saat potensi sudah tergali pun pemasaran merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat skala prioritas dalam penyelesaiannya. Penelitian dengan objek para pelaku usaha di BUMDes berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha di desa terkait dengan ilmu pengetahuan yang akan digunakan dalam mengembangkan potensi desa. Peran serta pemerintah dalam memberikan bantuan modal baik dalam bentuk hibah maupun kemudahan dalam memberikan kredit melalui perbankan juga sangat dibutuhkan dan terakhir terkait dengan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan dan upaya untuk menjual potensi desa melalui informasi yang terbuka kepada publik.

Urgensi dari penelitian ini mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 yang mengatur BUMDes Berangkat dari ketentuan tersebut maka pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut sebagai upaya dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat serta berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan urgensi masalah yang dihadapi BUMDes tersebut maka sangat diperlukan pendataan potensi desa melalui penyediaan database desa, hal ini akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga sangat perlu untuk mengkaji topik Model e-BUMDes pengembangan pedesaan

II. KERANGKA TEORI

A. BUMDes

BUMDes adalah badan usaha milik desa yang dikelola secara professional oleh aparatur desa. Sumber dana BUMDes berasal dari keuangan desa. Hasil keuntungan BUMDes digunakan sebagai pendapatan asli desa selain pajak desa. Masyarakat desa dapat berperan serta sebagai pemegang saham dalam operasional BUMDes baik itu secara organisasi maupun penyertaan modal dalam bentuk investasi. Hasil keuntungan bagi pemegang saham diberikan dalam bentuk dividen, hal ini sama seperti layaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

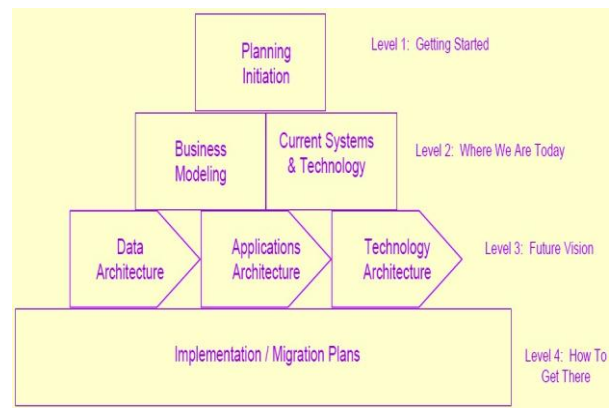
B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah tersebut, baik berupa pajak daerah maupun hasil investasi.

C. Enterprise Architecture Planning (EAP)

Enterprise Architecture Planning (EAP) merupakan metode yang dikembangkan untuk membangun arsitektur enterprise [1].

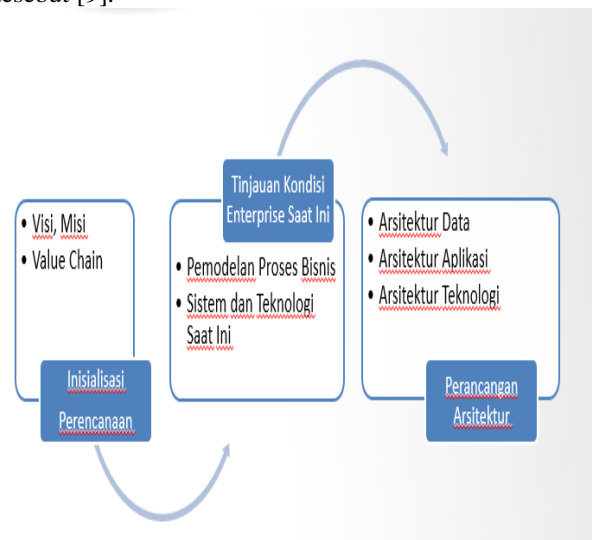
Tahapan pembangunan EAP (Gambar 1) adalah tahap untuk memulai, tahap memahami kondisi saat ini, tahap pendefinisian visi masa depan, dan tahap untuk menyusun rencana dalam mencapai visi masa depan.



Gambar 1. Lapisan Perencanaan Arsitektur Enterprise

III. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada kerangka Enterprise Architecture Planning (EAP). Enterprise Architecture Planning (EAP) merupakan proses pendefinisian arsitektur dalam penggunaan informasi dalam mendukung bisnis, serta rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut [9].



Gambar 2. Metode Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Business Process

Pelaksanaan business process BUMDes membutuhkan dukungan sistem informasi yang mampu melayani kebutuhan data dan informasi yang berkualitas bagi kebutuhan enterprise guna memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen maupun stakeholder lainnya, maka dibuat arsitektur bisnis yang menggunakan value chain untuk mendeskripsikan area sistem informasi enterprise ke dalam primary activities dan support activities.

Setelah proses bisnis didefinisikan, selanjutnya dilakukan identifikasi struktur organisasi yang isinya adalah unit organisasi. Area fungsi beserta proses bisnisnya dipetasilangkan dengan unit organisasi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi lingkup tanggung jawab pengambilan keputusan dan keterlibatan tiap unit organisasi dalam tiap area fungsi dan/atau proses bisnis.

LAYANAN UMUM : Perencanaan Layanan Umum, Operasi Layanan Umum, Pemantauan & Administrasi, Pelaporan & Rekomendasi				
KEUANGAN : Perencanaan & Penganggaran, Pengendalian Keuangan, Akuntansi & Audit, Pelaporan Keuangan				
MANAJEMEN SDM : Perencanaan Organisasi & SDM, Administrasi SDM, Pengembangan Kompetensi & Pemantauan, Pelaporan SDM				
PENGADAAN : Perencanaan Pengadaan, Pemilihan & Realisasi Pengadaan, Pengelolaan Kontrak, Disposisi & Pembayaran Pengadaan				
LOGISTIK MASUKAN	OPERASI	LOGISTIK KELUARAN	PEMASARAN & PENJUALAN	LAYANAN
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Produk & Proses Perancangan Produk Perancangan Proses Rekomendasi Engineering Perencanaan Keputuhan atas Standar Implementasi Standar Perencanaan Kehandaban & Pemeliharaan Aset Pemeriksaan Material & Layanan Perintah Pemeliharaan & Rekomendasi Perencanaan Pasokan Pesanan Pasokan Pemantauan Pasokan & Kendali Mutu Evaluasi Pasokan Perencanaan Proses Produksi Persiapan Aliran Masuk Pasokan Kawal Mutu Transmisi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran, Pengendalian, Kendali Mutu Penyimpanan Produk Jaspeksi & Pemeliharaan Pemantauan Kehandaban Pengendalian Keputuhan atas Standar Pelaporan Keputuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengantaran Produk Penjadwalan & Pemuatan Pengukuran & Sertifikasi Pengapalan & Pengemasan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Penasaran & Penjualan Penasaran & Promosi Pesanan Penasaran & Kontrak Evaluasi Penasaran & Penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Layanan Pelanggan Penyediaan Layanan Pelanggan Evaluasi Layanan Pelanggan

Gambar 3. Internal Value Chain

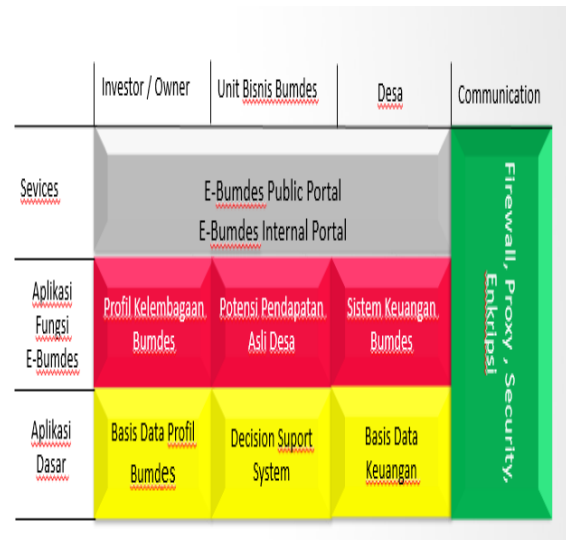
B. Arsitektur Data

Arsitektur data mengidentifikasi dan mendefinisikan data utama yang mendukung fungsi bisnis yang didefinisikan dalam model bisnis dan terdiri dari entitas data dan hubungannya dengan entitas data yang lain.

Identifikasi data menempatkan pembangunan arsitektur data sebagai langkah pertama dalam visi perencanaan masa depan. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi entitas yang ada dalam lingkup enterprise. Suatu entitas data bisa menunjang lebih dari satu area fungsi dan tidak berdiri sendiri.

C. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi merupakan proses pendefinisian aplikasi apa saja yang akan mengelola data dan menyediakan informasi untuk pihak manajemen terhadap fungsi bisnisnya. Arsitektur aplikasi merupakan langkah yang dilakukan setelah pembuatan arsitektur data.



Gambar 4 Arsitektur Aplikasi e-BUMDes

Langkah-langkah dalam mendefinisikan aplikasi adalah menentukan daftar kandidat aplikasi, menentukan relasi aplikasi terhadap fungsi, seleksi aplikasi dan proyeksi aplikasi. Spesifikasi teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan e-BUMDes dapat dilihat pada Gambar 4.

D. Arsitektur Teknologi

Arsitektur teknologi dalam konsep Enterprise Architecture Planning merupakan suatu definisi teknologi yang disarankan untuk digunakan yang akan mendukung fungsi bisnis dalam BUMDes.

Tujuan dari arsitektur teknologi adalah untuk mendefinisikan teknologi utama yang dibutuhkan sehingga tersedia lingkungan untuk aplikasi yang mengelola data [9].

Arsitektur teknologi yang dihasilkan bersifat konseptual sehingga bukan merupakan analisis kebutuhan secara detail melainkan gambaran umum e-BUMDes dan perlu ditinjau ulang saat melakukan implementasi. Secara umum konfigurasi konseptual teknologi tersebut dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu arsitektur jaringan enterprise konseptual dan arsitektur sistem bisnis konseptual.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan model E-BUMDes sebagai dasar untuk mengembangkan aplikasi e-BUMDes. Pengembangan e-BUMDes diharapkan sebagai sumber informasi bagi pendapatan asli desa pada satu wilayah. Model e-BUMDes yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan prototype secara umum

untuk pengembangan e-BUMDes. Untuk lebih mecirikan jenis entitas bisnis, model e BUMDEs dapat dikembangkan sesuai dengan jenis usaha BUMDes seperti jenis usaha dagang, jasa, dan manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://www.keuangedesa.com/2016/05/manfaat-badan-usaha-milik-des-a-bum-des-a-bagi-masyarakat/>
- [2] <http://www.berdesa.com/pentingnya-idealisme-dalam-menjalankan-badan-usaha-milik-des-a-bumdesa/>
- [3] <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-des-a-melalui-bumdes.html>
- [4] http://www.kompasiana.com/ryanjulian/bumdes-problematika-dan-solusi_56d7a0bf147f61f50b489ed1
- [5] http://www.kompasiana.com/arisahmadrisadi/apa-itu-bum-des-a_58aeba2dc223bdfa0678ee35
- [6] Junaedi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Jurnal NeO-Bis Volume 9, No. 1
- [7] Khairinaa ,Dyna Marisa, Mustafidb, Beta Noranitac. Enterprise Architecture Planning Untuk Pengembangan Sistem Informasi Perguruan Tinggi, Jurnal Sistem Informasi Bisnis 03 (2012)
- [8] Muhamad Ismail dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Bisnis Volume XIX No. 2: ISSN 1979 6471
- [9] Spewak, S.H, Enterprise architecture planning: developing a blueprint for data application, and technology, john Wiley & Son,1993.
- [10] Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat